



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

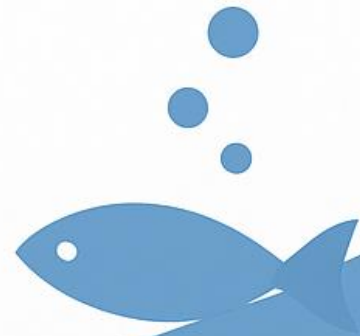
#2024
KKP BEYOND



RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2024



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

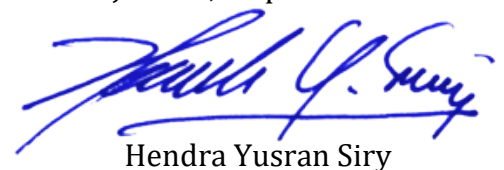
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil reviu dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta arahan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP).

Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan, agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional, RPJMN 2020-2024, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini juga memuat penyesuaian terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta respons terhadap perubahan kebijakan kelembagaan dan penganggaran di lingkup BPPSDM KP.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik dalam hal penyajian maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen dan peningkatan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian bagi kemajuan bangsa dan negara.

Jakarta, April 2024



Hendra Yusran Siry

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
1.3 Analisis Potensi dan Permasalahan	24
II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	27
2.1 Visi	27
2.2 Misi	27
2.3 Tujuan	28
2.4 Sasaran Strategis	28
III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	31
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	31
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	32
3.3 Arah Kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	33
3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	36
3.5 Kerangka Regulasi	38
3.6 Kerangka Kelembagaan	44
IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	46
4.1 Indikator Kinerja	46
4.2 Kerangka Pendanaan	48
V PENUTUP	50
LAMPIRAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia pada periode 2020-2024 berlangsung dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN ini menekankan pencapaian daya saing perekonomian nasional yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, dengan basis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi pembangunan nasional 2020-2024 adalah mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam konteks kelautan dan perikanan, hal ini diwujudkan melalui percepatan pembangunan yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta penguatan kedaulatan dan daya saing sektor kelautan dan perikanan.

Secara umum, kondisi sektor kelautan dan perikanan Indonesia saat ini menunjukkan potensi besar yang meliputi sumber daya ikan yang melimpah, wilayah laut yang luas, serta peran strategis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti overfishing, degradasi lingkungan laut, perubahan iklim, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan menunjukkan tren positif, antara lain peningkatan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan, nilai ekspor hasil perikanan, serta konsumsi ikan per kapita. Target-target strategis ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan KKP selama periode 2020-2024.

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan unit kerja baru yang dibentuk melalui pemisahan tugas dan fungsi dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pusat ini berada di bawah Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi KKP.

Peran strategis Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Pendampingan teknis kepada pelaku utama, pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha, serta pembentukan badan usaha sektor kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan fasilitasi kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam memperoleh perizinan berusaha.
3. Pengembangan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan sebagai model inovasi dan praktik terbaik di lapangan.

Dengan demikian, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berfungsi sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan melalui penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha serta penguatan tata kelola sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2024 menjadi dasar untuk pengembangan strategi dan program Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Sampai dengan akhir tahun 2023, capaian kinerja Pusluh KP ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Capaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2020-2023

No.	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh (kelompok)	41.000	47.754	41.000	47.378	45.000	47.181	47.000	47.612
2	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)	-	-	1.500	1.794	1.800	1.972	1.980	2.047
3	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)	-	-	2.000	3.613	3.000	4.029	3.400	3.758

4	Jumlah tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	-	-	-	-	14.082	15.221	12.342	12.519
5	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas)	-	-	-	-	5	5	9	9
6	Jumlah percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan (unit/produk/kelompok)	12	13	9	9	20	20	21	21
7	Jumlah sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)			8	8	10	10	10	10
8	Jumlah prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	5	5	7	7	2	2	5	5
9	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Puslatluh yang disepakati dan ditindaklanjuti (dokumen)	5	5	8	13	8	14	10	16

Sumber: Laporan Kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP 2020-2023

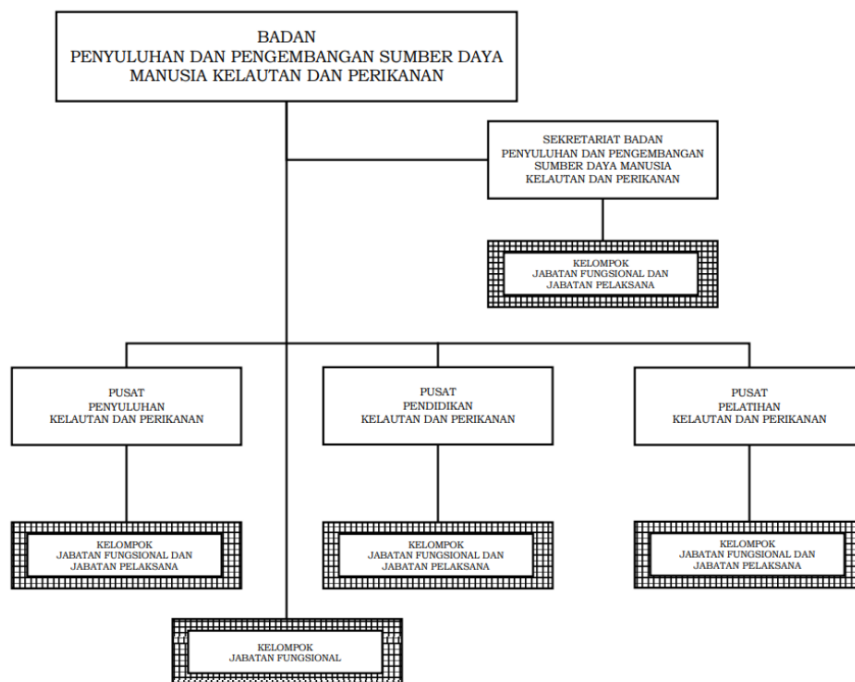
Capaian kinerja tersebut merupakan capaian dari kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pencapaian kinerja pada Tabel 1 menunjukkan bahwa program penyuluhan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan nasional, yaitu peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan pelaku utama, dan penguatan kelembagaan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kinerja yang melampaui target pada sebagian besar indikator mencerminkan efektivitas strategi penyuluhan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas basis pelaku usaha, serta mendorong inovasi dan kolaborasi. Selain itu, capaian ini juga menjadi modal penting bagi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja baru hasil pemisahan organisasi (berdasarkan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024), untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

1.2.1.1 Organisasi

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) memiliki potensi strategis yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional, khususnya dalam bidang organisasi. Sebagai unit kerja baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusluh KP berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Posisi ini memberikan Pusluh KP peran sentral dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Secara organisasi, Pusluh KP memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan fungsi pendampingan teknis, fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha, serta pembentukan badan usaha sektor kelautan dan perikanan. Potensi ini didukung oleh struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung koordinasi dan

sinergi antar unit kerja serta pemangku kepentingan terkait, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan yang semakin kompleks dan dinamis.

Berdasarkan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024, tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Melaksanakan pendampingan teknis kepada pelaku utama dan kelompok pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha.
2. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha serta pembentukan badan usaha kelautan dan perikanan sebagai upaya memperkuat kelembagaan dan daya saing.
3. Menyelenggarakan fasilitasi kelompok pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha guna mendukung legalitas dan keberlanjutan usaha.
4. Mengembangkan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan sebagai model inovasi dan praktik terbaik yang dapat direplikasi di berbagai wilayah.
5. Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas penyuluhan secara efektif dan efisien.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, Pusluh KP memiliki kapasitas organisasi yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Struktur organisasi yang adaptif dan fungsi yang jelas memungkinkan Pusluh KP untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan penyuluhan, sekaligus memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai stakeholder.

Secara keseluruhan, potensi organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sangat mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024.

1.2.1.2 Sumber Daya

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) memiliki potensi sumber daya yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Salah satu kekuatan utama Pusluh KP terletak pada keberadaan

sumber daya manusia yang kompeten dan tersebar secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki lebih dari 4.000 penyuluh, meliputi penyuluh PNS yang didukung oleh penyuluh P3K dan penyuluh bantu, yang tersebar di 37 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota. Keberadaan penyuluh yang tersebar ini memungkinkan Pusluh KP untuk menjangkau pelaku usaha kelautan dan perikanan di berbagai daerah, memberikan pendampingan teknis, serta mempercepat transfer teknologi dan inovasi.

Selain sumber daya manusia, Pusluh KP juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan, termasuk fasilitas pelatihan dan percontohan yang menjadi media efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Pengembangan aplikasi digitalisasi penyuluhan juga menjadi salah satu inovasi penting yang meningkatkan efektivitas pelaporan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penyuluhan, sekaligus memperkuat jejaring komunikasi antara penyuluh, pelaku usaha, dan pemerintah pusat maupun daerah.

Pusluh KP juga memiliki potensi besar dalam hal jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, swasta, maupun organisasi masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah dokumen kerjasama yang disepakati dan ditindaklanjuti, yang mendukung sinergi dalam pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

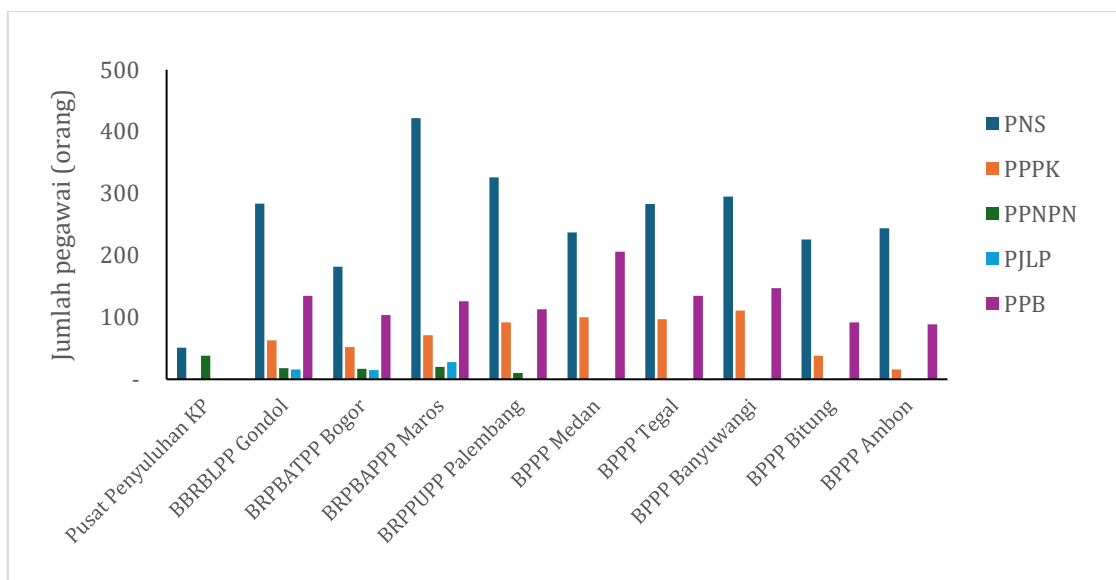
Secara kelembagaan, Pusluh KP merupakan unit kerja yang berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan tugas dan fungsi strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024. Tugas utama Pusluh KP meliputi pelaksanaan pendampingan teknis kepada pelaku utama dan kelompok pelaku usaha, fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok serta badan usaha kelautan dan perikanan, fasilitasi perizinan usaha, serta pengembangan percontohan penyuluhan sebagai model inovasi dan praktik terbaik di lapangan.

Dengan potensi sumber daya manusia yang luas dan terlatih, didukung sarana teknologi digital, serta jaringan kerja sama yang kuat, Pusluh KP memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi penyuluhan secara profesional dan efektif. Hal ini sangat penting untuk mendorong peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan di Indonesia, sejalan dengan visi dan misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung transformasi sektor kelautan dan perikanan menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.

1.2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

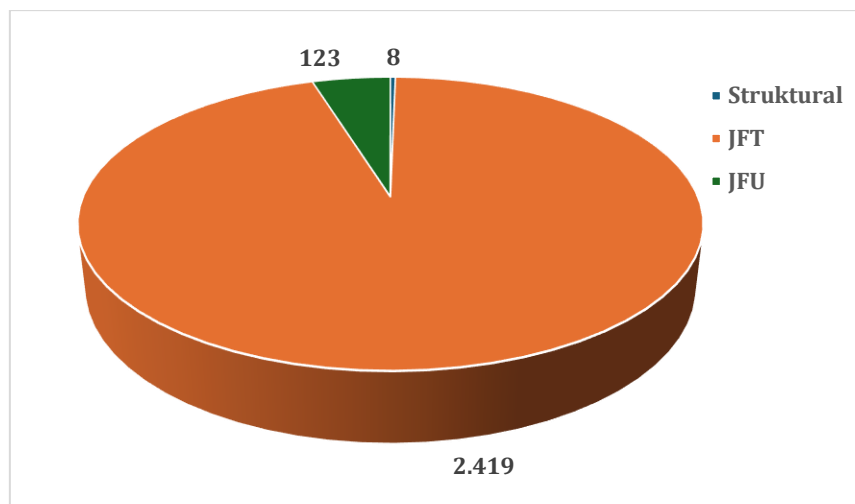
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) dan UPT lingkup memiliki pegawai sebanyak 4.500 orang pada tahun 2024 yang terdiri dari 2.550 orang PNS (56,67%) dan 1.950 orang tenaga kontrak (43,33%). Dari jumlah PNS tersebut, 8 orang merupakan pejabat struktural (0,31%), 2.419 orang adalah pejabat fungsional tertentu (94,86%), dan 123 orang sebagai pejabat fungsional umum (4,82%). Pejabat fungsional tertentu lingkup Pusluh KP didominasi oleh penyuluh perikanan sebanyak 2.332 orang (96,40%) dan sisanya adalah pejabat fungsional lainnya sebanyak 87 orang (3,60%). Tenaga kontrak di lingkup Pusluh KP terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 641 orang (32,87%), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 103 orang (5,28%), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 59 orang (3,03%), dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 1.147 orang (58,82%).



Gambar 2. Komposisi pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2024

Keberadaan sumber daya manusia yang cukup besar dan tersebar luas ini memberikan Pusluh KP kemampuan untuk menjangkau pelaku utama dan kelompok

usaha di sektor kelautan dan perikanan secara efektif. Penyuluh memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan teknis, transfer teknologi, serta fasilitasi pengembangan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, penyuluh juga menjadi ujung tombak dalam menyampaikan pesan konservasi dan keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi, yang penting untuk keberlanjutan sumber daya kelautan bagi generasi mendatang.



Gambar 3. Komposisi PNS lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2024 berdasarkan jabatan

Tabel 2. Komposisi jabatan fungsional tertentu lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2024

JFT	Jumlah (orang)	Persentase
Penyuluh Perikanan	2.332	96,40%
Perencana	19	0,79%
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	12	0,50%
Analisis SDM Aparatur	9	0,37%
Instruktur	9	0,37%
Analisis Kebijakan	7	0,29%
Pranata Keuangan APBN	6	0,25%
JFT Lainnya	25	1,03%
Total	2.419	

Sumber: Data Pegawai lingkup BPPSDM KP tahun 2024

Pusluh KP juga tengah melakukan transformasi penyuluhan yang difokuskan pada peningkatan profesionalisme dan efektivitas layanan. Transformasi ini mencakup penyempurnaan mekanisme kerja berbasis kinerja, peningkatan kapasitas melalui pelatihan formal hingga jenjang pendidikan tinggi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring, pelaporan, dan pengembangan kompetensi penyuluh. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan penyuluhan sehingga berdampak positif dan nyata bagi produktivitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional.

Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakmerataan penyebaran penyuluh dan kebutuhan peningkatan kapasitas masih perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan intensif, program mentoring, dan pengembangan jejaring kerja sama menjadi prioritas untuk memastikan penyuluh mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan inovatif di lapangan.

Dengan potensi sumber daya manusia yang besar, kompeten, dan didukung oleh program transformasi yang berkelanjutan, Pusluh KP memiliki kapasitas yang memadai untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, memperkuat kelembagaan pelaku usaha, serta mendukung pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Penyuluh Perikanan

Penyuluh perikanan di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) memegang peran kunci sebagai ujung tombak dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Mereka bertugas menyelenggarakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik nelayan, pembudidaya, pengolah, hingga pemasar hasil perikanan. Peran strategis ini menempatkan penyuluh sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Secara organisasi, Pusluh KP menjalankan fungsi penyusunan kebijakan teknis dan program penyuluhan, pelaksanaan tata kelola penyuluhan, pendampingan teknis, pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha, fasilitasi perizinan, pengembangan percontohan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan. Dalam praktiknya, penyuluh perikanan melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari penyusunan rencana kerja, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan

kelompok, peningkatan akses teknologi dan informasi, hingga fasilitasi kemitraan usaha dan akses pembiayaan.

Penyuluh juga berperan penting dalam membentuk, memfasilitasi, dan mendampingi kelompok-kelompok perikanan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pokdakan, Poklahsar, dan lainnya. Melalui pertemuan kelompok, penyuluh membantu anggota kelompok dalam menyusun rencana kerja, mengambil keputusan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan usaha perikanan. Selain itu, penyuluh menjadi agen perubahan sosial dengan menyampaikan inovasi, teknologi, serta pesan-pesan konservasi dan keberlanjutan sumber daya perikanan kepada masyarakat.

Tabel 3. Komposisi penyuluh perikanan lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2024

No.	Provinsi	PNS	PPPK	PPB	Jumlah
1	Aceh	79	20	77	176
2	Sumatera Utara	38	27	44	109
3	Sumatera Barat	69	27	42	138
4	Riau	45	16	30	91
5	Kepulauan Riau	6	10	13	29
6	Jambi	41	15	18	74
7	Bengkulu	65	9	29	103
8	Sumatera Selatan	93	34	33	160
9	Bangka Belitung	30	3	12	45
10	Lampung	53	23	21	97
11	Banten	14	9	17	40
12	DKI Jakarta	7	5	9	21
13	Jawa Barat	112	67	78	257
14	Jawa Tengah	163	74	79	316
15	DIY	18	11	14	43
16	Kalimantan Barat	70	11	24	105
17	Kalimantan Timur	32	1	18	51
18	Jawa Timur	181	98	119	398
19	Kalimantan Selatan	114	13	28	155
20	Bali	33	22	22	77
21	Nusa Tenggara Barat	76	23	46	145
22	Nusa Tenggara Timur	70	8	61	139
23	Kalimantan Tengah	67	3	6	76
24	Kalimantan Utara	29	5	13	47

25	Sulawesi Utara	79	12	27	118
26	Sulawesi Tengah	72	12	36	120
27	Gorontalo	46	9	16	71
28	Sulawesi Barat	32	5	22	59
29	Sulawesi Tenggara	107	21	36	164
30	Sulawesi Selatan	252	48	68	368
31	Maluku	62	9	37	108
32	Maluku Utara	59	2	19	80
33	Papua	53	1	10	64
34	Papua Tengah	6	0	3	9
35	Papua Selatan	4	2	3	9
36	Papua Barat	34	0	7	41
37	Papua Barat Daya	26	2	10	38
Total		2.337	657	1.147	4.141

Sumber: Data Pegawai lingkup BPPSDM KP tahun 2024

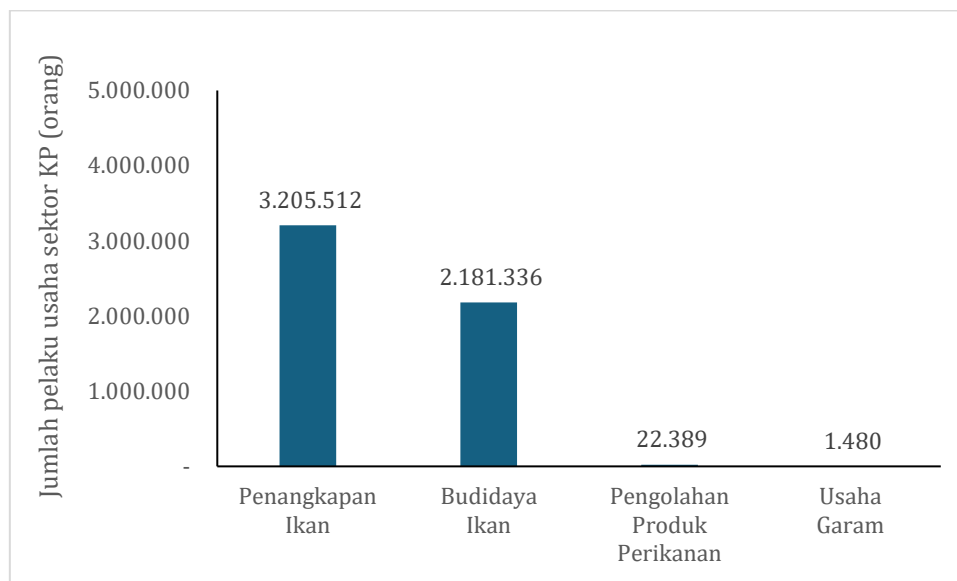
Saat ini, jumlah penyuluh kelautan dan perikanan di Indonesia lebih dari 4.000 orang, terdiri dari penyuluh PNS, PPPK, dan penyuluh perikanan bantu yang tersebar di 37 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti distribusi penyuluh yang belum merata, dominasi penyuluh di bidang perikanan budidaya, dan kebutuhan peningkatan kapasitas serta profesionalisme penyuluh. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong transformasi penyuluhan melalui peningkatan kompetensi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital agar layanan penyuluhan semakin profesional, efektif, dan berdampak nyata bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dengan peran dan tugasnya yang strategis, penyuluh perikanan di bawah Pusluh KP diharapkan mampu memperkuat kelembagaan pelaku utama, meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, serta mewujudkan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang.

Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

Pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan dan kemajuan industri kelautan dan perikanan nasional. Pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah setiap orang atau kelompok yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir. Mereka meliputi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam,

pengolah hasil perikanan, hingga pelaku usaha pemasaran dan distribusi produk kelautan dan perikanan. Dalam rangka mendukung identitas dan legalitas pelaku usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sebagai identitas tunggal yang juga berfungsi sebagai dasar perencanaan program, pemantauan, evaluasi, serta integrasi kebijakan lintas sektor. Jumlah pelaku usaha per bidang usaha tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut.



Gambar 4. Jumlah pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan per bidang usaha tahun 2023

Sumber: Portal data KKP (<https://portaldata.kkp.go.id/>)

Pelaku usaha memiliki peran sentral dalam menggerakkan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk, serta menciptakan lapangan kerja. Kolaborasi antara pelaku usaha, nelayan tradisional, dan pemerintah sangat penting untuk memajukan industri perikanan nasional, meningkatkan ekspor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan adalah individu atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor ini, baik melalui penyediaan barang maupun jasa. Mereka dapat berasal dari berbagai kalangan, seperti tenaga kerja pendukung, penyuluh, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, swasta, hingga lembaga riset dan inovasi. Peran pelaku pendukung sangat penting dalam menyediakan infrastruktur, teknologi, keahlian, pembiayaan, serta pengembangan

inovasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha agar usaha mereka dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan.

Sinergi antara pelaku usaha dan pelaku pendukung menjadi kunci dalam memperkuat rantai nilai sektor kelautan dan perikanan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Kerja sama ini juga didorong melalui berbagai program penyuluhan, pelatihan, dan kemitraan usaha yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan daya saing sektor kelautan dan perikanan di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, keberadaan dan peran aktif pelaku usaha serta pelaku pendukung sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

1.2.1.2.2 Sarana-Prasarana

Sarana dan prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan komponen penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) dalam memberikan layanan penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Pusluh KP didukung oleh berbagai sarana transportasi seperti kendaraan roda dua dan roda empat, perahu motor, serta alat komunikasi dan teknologi informasi yang memadai, termasuk komputer, perangkat mobile, dan aplikasi digital untuk mempercepat proses penyuluhan dan pelaporan. Sarana teknis seperti alat ukur kualitas air (DO meter, pH meter, *salinity* meter) juga tersedia untuk mendukung penyuluhan budidaya perikanan berbasis data.

Selain itu, Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) serta Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPPP) sebagai unit pelaksana di daerah juga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penyuluhan, seperti pos penyuluhan yang dilengkapi dengan ruang pertemuan, media informasi, dan alat komunikasi. Satminkal dan BPPPP berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pelayanan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, memfasilitasi interaksi langsung antara penyuluh dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pusluh KP dan UPT lingkungannya ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan UPT lingkup

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah	2.616.487 m ²	2.753.044.319.846
2	Bangunan dan Gedung	218.390 m ²	490.586.628.195
3	Jalan dan Jembatan	33.741 m ²	6.686.745.536
4	Instalasi dan Jaringan	79 paket	9.452.672.046
5	Mesin Peralatan Khusus TIK	2.147 unit	21.902.459.520
6	Mesin Peralatan Lainnya	15.953 unit	180.797.148.598
7	Alat Angkutan Bermotor	921 unit	38.932.462.474
8	Aset Tak Berwujud	110 unit	6.050.139.840
9	Aset Tetap Lainnya	2.185 unit	1.419.831.245
Total			3.508.872.407.300

Sumber: Data Aset lingkup Pusluh KP tahun 2024 berdasarkan aplikasi SIMAN

Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ini menjadi perhatian utama untuk memastikan kelancaran operasional penyuluhan. Peningkatan investasi pada infrastruktur penyuluhan, termasuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, menjadi prioritas guna mendukung transformasi digital penyuluhan kelautan dan perikanan. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di tingkat pusat melalui Pusluh KP, serta di tingkat daerah melalui Satminkal dan BPPP, penyuluhan kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berdampak luas bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.

1.2.1.2.3 Sumber Daya Lainnya

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) didukung oleh sumber daya lainnya yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan fungsi penyuluhan secara efektif dan berkelanjutan. Sumber daya ini meliputi jejaring kerja sama, kemitraan strategis, kelembagaan penyuluhan, serta mekanisme penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi.

Pusluh KP aktif membangun dan mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jejaring ini mencakup kolaborasi dengan unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta. Melalui kemitraan tersebut, Pusluh KP dapat memperkuat kapasitas

penyuluhan, memperluas jangkauan pendampingan, dan mempercepat transfer teknologi serta inovasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kerja sama ini juga mendukung pengembangan model-model penyuluhan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Sebagai bagian dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusluh KP memiliki struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas penyuluhan secara terorganisir dan profesional. Kelembagaan ini meliputi Pusat Penyuluhan di tingkat nasional, Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di tingkat kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan di lapangan, serta Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPPP) sebagai unit pelaksana teknis yang menyediakan fasilitasi penyuluhan. Struktur ini memungkinkan penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah dengan mekanisme koordinasi yang efektif.

Pusluh KP menyelenggarakan kegiatan penyuluhan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kelompok, dengan fokus pada pendampingan teknis, fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha, serta pengembangan percontohan penyuluhan. Penyelenggaraan ini didukung oleh sistem informasi manajemen penyuluhan yang memudahkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara real-time. Penggunaan teknologi digital juga memperkuat efektivitas penyuluhan, mempercepat penyebaran informasi, serta meningkatkan interaksi antara penyuluh dan pelaku usaha.

Dengan dukungan jejaring kerja sama yang luas, kelembagaan yang terstruktur, serta mekanisme penyelenggaraan yang modern dan adaptif, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam memberdayakan masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Jejaring, Kemitraan dan Kerja Sama

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) secara aktif membangun, memperluas, dan memperkuat jejaring, kemitraan, serta kerja sama dengan berbagai pihak sebagai strategi utama dalam mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pemberdayaan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Di tingkat nasional, Pusluh KP dan unit pelaksana teknis di bawahnya menjalin kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan, lembaga riset, dunia usaha, koperasi, dan kelompok masyarakat. Beberapa contoh kemitraan strategis yang telah dijalankan antara lain:

1. Universitas dan Sekolah Kejuruan: Kerja sama dengan Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar (2024–2026) dan SMK Negeri 2 Indramayu (2024–2026) untuk peningkatan kapasitas SDM di bidang kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
2. Kelompok Usaha dan Koperasi: Kemitraan dengan Kelompok Pembudidaya Mina Padi Raya, KUGAR Bumi Putih IX, dan Koperasi Pegawai Balali Dita dalam pengembangan model usaha, pendampingan teknologi, dan pengelolaan sumber daya berbasis kelompok.
3. Perusahaan Swasta: Kolaborasi dengan PT. Caprifarmindo Laboratories, PT. Esaputlii Pratama, PT. Tri Karta Pratama, dan CV Seruni Benur dalam penyediaan benih unggul, pengembangan teknologi budidaya, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola hatchery dan tambak.
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kerja sama dengan PT PLN Indonesia Power UBP Barru dalam penyediaan sarana usaha perikanan, pengembangan eduwisata mangrove, dan pelatihan SDM.

Pusluh KP juga menjalin kemitraan internasional, salah satunya dengan Food and Agriculture Organization (FAO) sejak tahun 2017 hingga 2024. Kerja sama ini berfokus pada penguatan kerangka pengelolaan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati perairan darat, perlindungan ekosistem air tawar, dan peningkatan kapasitas konservasi.

Tabel 5. Daftar kemitraan dan kerja sama yang dijalin oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan selama 2020-2024

No.	Satuan Kerja	Mitra	Status	Jangka Waktu	Dokumen
1	Pusluh KP	Food and Agriculture Organization (FAO)	Lanjutan	2 Februari 2017 - 20 September 2024	Memperkuat kerangka pengelolaan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati perairan darat untuk meningkatkan perlindungan ekosistem air tawar bernilai konservasi tinggi dan keanekaragaman hayatinya di Indonesia
2	BBRBLPP	CV Jaya Utama Abadi	Lanjutan	7 Maret 2022 - 7 Maret 2025	Kemitraan antara BBRBLPP dengan CV Jaya Abadi terkait Sewa menyewa BMN berupa sebagian tambak pada instalasi tambak pejarakan Nomor: B.528/BRSDM - BBRBLPP/PL.700/III/2022 Nomor: B.01/JUA/III/2022
3	BBRBLPP	Koperasi Pegawai Balali Dita	Lanjutan	2 Juli 2021 - 2 Juli 2025	Kemitraan antara BBRBLPP dengan Koperasi Pegawai Balali Dita terkait Sewa menyewa BMN berupa tambak dan gedung pada instalasi tambak pejarakan Nomor: B.1818/BRSDMBBRBLPP/PL.700/VIII/2021 Nomor: B.01/KOPBLD/VIII/2021
4	BBRBLPP	UD Hadi Rama	Lanjutan	2 Agustus 2022 - 2 Agustus 2025	Kemitraan antara BBRBLPP dengan UD Hadi Rama terkait Sewa menyewa BMN berupa sebagian tambak pada instalasi tambak pejarakan Nomor: B.135/BRSDMBBRBLPP/PL.700/V/2022
5	BBRBLPP	Kugar Bumi Putih IX	Lanjutan	4 Desember 2023 - 4 Desember 2025	Kemitraan antara BBRBLPP dengan Kugar Bumi Putih IX terkait Pendampingan Teknologi dan Kelembagaan Kelompok Usaha Garam Mendukung Program <i>Smart Fisheries Village (SFV)</i> NOMOR: 92/BRSDM/KKP/PKS/XI/2023
6	BRPBATPP	PT. Caprifarmindo Laboratories	Lanjutan	12 Agustus 2020 - 12 Agustus 2025	Kerjasama lisensi dengan PT. Caprifarmindo Laboratories Nomor: 10/BRSDM/KKP/PKS/VIII/2020 Nomor: 043/VIII/20/CAPRI-VET Ditandatangani: 12 Agustus 2020
7	BRPBATPP	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pajajaran Bogor	Lanjutan	22 Desember 2023 - 21 Desember 2026	Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Ruang Untuk Pengoperasian ATM BRI antara Balai riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pajajaran Bogor Nomor: 02/BRSDM-BRPBATPP/PKS/V/2021 Nomor: B.1308a -XIV/KC/LOG/05/2021 Ditandatangani: 20 Mei 2021
8	BRPBATPP	Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar	Baru	2 Januari 2024 - 2 Januari 2026	Kemitraan antara BRPBATPP dengan Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar Nomor :B/105/UN57.F4/KS.05.00/2024 Nomor :2/BPPSDM/KKP/PKS/I/2024 Ditandatangani: 2 Januari 2024

9	BRPBATPP	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Indramayu (SMKN 2 Indramayu)	Baru	13 Agustus 2024 - 13 Agustus 2026	Kemitraan antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu adalah Kerjasama terkait peningkatan kapasitas SDM di bidang kelautan dan perikanan Nomor: 35/BPPSDM/KKP/PKS/VIII/2024 Nomor: 837/PK.01.02/SMKN2-CadisdikWil.IX Ditandatangani: 13 Agustus 2024
10	BRPBAPPP	PT. Esaputlii Pratama	Lanjutan	30 Januari 2023 - 30 Januari 2025	Kerjasama antara BRPBAPPP dengan PT. Esaputlii Pratama terkait: a) penyediaan naupli udang vaname unggul berkualitas mendukung <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV) berbasis UPT b) menyediakan tenaga ahli/expert pembenihan udang; Nomor: 3/BRSDM/KKP/PKS/I/2023
11	BRPBAPPP	Kelompok Pembudidaya Mina Padi Raya	Lanjutan	8 Desember 2023 - 8 Desember 2026	Kerjasama antara BRPBAPPP dengan Kelompok Pembudidaya Mina Padi Raya terkait: a) pengelolaan sawah melalui minapadi untuk pengembangan SFV b) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan untuk kegiatan minapadi Nomor: 88/BPPSDM/KKP/PKS/XII/2023
12	BRPBAPPP	Common Room Network Foundation	Baru	6 Februari 2024 - 6 Februari 2026	Kerjasama antara BRPBAPPP dengan <i>Common Room Network Foundation</i> terkait: a) peningkatan kapasitas SDM untuk penggunaan teknologi dan informasi (TIK) b) pengembangan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital dan mendukung SFV Nomor: 11/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024
13	BRPBAPPP	PT PLN Indonesia Power Ubp Barru	Baru	12 September 2024 - 12 September 2027	Kerjasama antara BRPBAPPP dengan Kelompok PT PLN INDONESIA POWER UBP BARRU terkait: a) penyediaan sarana usaha perikanan dan pengembangan eduwisata mangrove mendukung <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV) Desa Ajakkang; b) pengembangan SDM KP (Pelatihan, Penyuluhan); Nomor: 11/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024
14	BRPBAPPP	PT. Tri Karta Pratama	Lanjutan	6 Maret 2023 - 6 Maret 2028	Kerjasama antara BRPBAPPP dengan PT. Tri Karta Pratama terkait: a) pengembangan SDM KP (pendidikan, pelatihan dan penyuluhan) b) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM calon pengelola hatchery udang dan tambak pembesaran udang windu teknologi tradisional plus sampai semi intensif. c) pelaksanaan kegiatan pembenihan udang windu (produksi naupli), dan pembesaran udang windu sistem tradisional sampai semi intensif di tambak. Nomor: 10 /BRSDM/KKP/PKS/III/2023 Nomor: 004/BT.SB/TKP/III/2023

15	BRPBAPP	CV Seruni Benur	Lanjutan	24 Januari 2023 - 24 Januari 2025	Kerjasama antara BRPBAPP dengan CV Seruni Benur terkait: a) menyediakan benur unggul berkualitas dari hasil pembenihan udang untuk mendukung kegiatan Smart Fisheries Village (SFV); b) pendampingan pembenihan/penggelodongan udang; c) pemantauan kualitas air dan lingkungan pembenihan/penggelodongan udang. Nomor: 4/BRSDM/KKP/PKS/I/2023 Nomor: 01/SB/LKW/I/2023
16	BRPPUPP	UT Daerah Palembang	Lanjutan	2 Oktober 2023 - 2 Oktober 2026	Kerjasama antara BRPPUPP dengan UT Daerah Palembang terkait Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang (BRPPUPP) melalui program pendidikan sarjana dan pascasarjana di Universitas Terbuka Nomor: 47/BPPSDM/KKP/PKS/X/2023 Nomor: B/687/UN31.UT9/HK.08.00/2023
17	BRPPUPP	PT. Dizamatra Powerindo	Lanjutan	21 Oktober 2023 - 21 Oktober 2028	Kerjasama antara BRPPUPP dengan PT Dizamatra Powerindo terkait sewa menyewa BMN berupa sebagian tanah milik BRPPUPP Nomor: B.1421/BRSDM-BRPPUPP/PL.210/X/2023 Nomor: 021/BRPPUPP-DP/PKS/X/2023

Sumber: Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Berbagai kemitraan yang dijalankan mendukung program-program prioritas seperti Smart Fisheries Village (SFV), pengembangan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan kelompok usaha. Kolaborasi dengan *Common Room Network Foundation*, misalnya, berfokus pada peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat perikanan.

Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan salah satu sumber daya utama yang menopang efektivitas pelaksanaan penyuluhan di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusluh KP memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan terorganisir, yang diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024.

Pusluh KP bertugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan secara nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusluh KP menjalankan berbagai fungsi kelembagaan antara lain: penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

penyuluhan; pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan; pendampingan teknis kepada pelaku utama, pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha, serta pembentukan badan usaha sektor kelautan dan perikanan; fasilitasi kelompok pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha; pengembangan percontohan penyuluhan; pelaksanaan rekayasa sosial masyarakat kelautan dan perikanan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan; serta pelaksanaan urusan administrasi kelembagaan.

Struktur kelembagaan penyuluhan ini tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga terintegrasi hingga ke tingkat daerah melalui unit pelaksana teknis seperti Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) serta Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP). Di tingkat kabupaten/kota, kelembagaan penyuluhan didukung oleh satuan kerja yang menangani fungsi penyuluhan dan administrasi penyuluh perikanan, sehingga koordinasi dan pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Bentuk kelembagaan penyuluhan perikanan meliputi:

1. Tingkat pusat

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang bertugas mengoordinasikan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia.

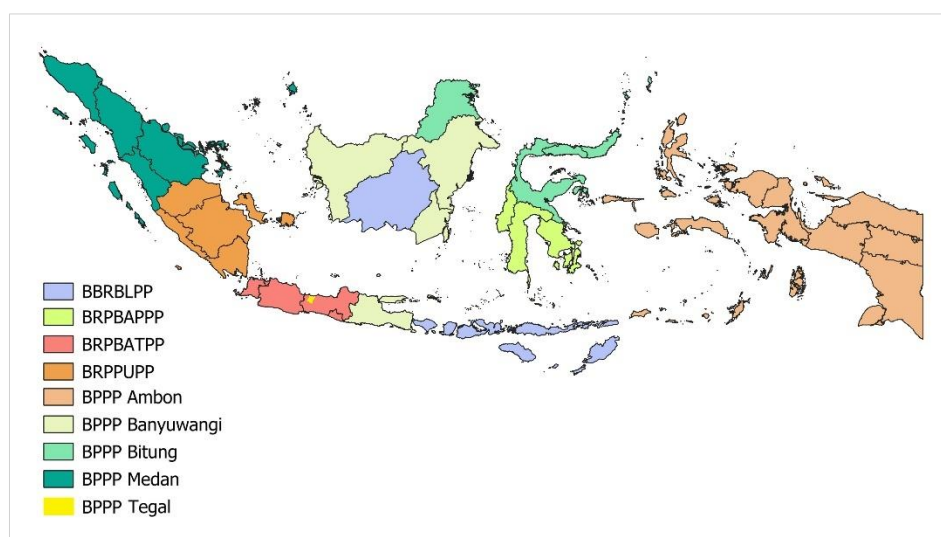
2. Tingkat daerah

a. Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal), meliputi:

- 1) Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Gondol, Bali dengan wilayah kerja: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah;
- 2) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor, dengan wilayah kerja: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah (kecuali Kota Tegal dan Kabupaten Tegal) dan DI Yogyakarta;
- 3) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros, dengan wilayah kerja: Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan;

- 4) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Palembang, dengan wilayah kerja: Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung.
- b. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), meliputi:
- 1) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, dengan wilayah kerja: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Riau;
 - 2) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, dengan wilayah kerja: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal;
 - 3) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, dengan wilayah kerja: Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
 - 4) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, dengan wilayah kerja: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Kalimantan Utara;
 - 5) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, dengan wilayah kerja: Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Distribusi wilayah kerja Satminkal Penyuluhan Perikanan dan BPPP ditampilkan pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Distribusi wilayah kerja Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan serta Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP)

Model kelembagaan penyuluhan di Pusluh KP juga didukung oleh kolaborasi dengan kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta, dan swadaya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini memungkinkan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, serta pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Dengan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat, Pusluh KP mampu menjadi motor penggerak utama dalam penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan yang profesional, terukur, dan berkelanjutan. Kelembagaan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekaligus memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat nasional dan global.

1.2.1.2.4 Anggaran

Anggaran penyuluhan di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam periode 2020-2024, Pusluh KP mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang secara keseluruhan mengalami peningkatan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan program dan dinamika pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2024, pagu anggaran KKP mencapai lebih dari Rp7 triliun, dengan alokasi untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,45 triliun. Perkembangan anggaran lingkup Pusluh KP per satuan kerja selama periode 2020-2024 disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 6. Perkembangan anggaran lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan per satuan kerja selama periode 2020-2024

No.	Satuan Kerja	Anggaran (Rp000,00)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pusat Penyuluhan KP	2.969.975	15.294.743	10.680.181	14.527.385	30.436.788
2	BBRBLPP Gondol	57.428.667	56.535.081	77.003.244	73.795.891	79.151.609
3	BRPBATPP Bogor	36.360.051	35.649.383	48.384.323	51.501.864	96.023.914

4	BRPBAPPP Maros	70.820.551	72.450.512	99.328.839	102.660.245	113.886.024
5	BRPPUPP Palembang	61.206.019	58.984.830	76.723.684	80.190.946	86.244.989
6	BPPP Medan	15.213.512	14.015.255	12.022.560	12.129.880	13.671.180
7	BPPP Tegal	13.208.415	12.150.103	10.030.084	10.567.000	11.484.200
8	BPPP Banyuwangi	12.335.714	11.882.400	9.891.000	10.101.880	12.577.340
9	BPPP Bitung	7.445.927	6.319.667	6.151.876	6.176.840	7.379.020
10	BPPP Ambon	4.849.776	4.678.023	6.191.528	7.019.290	8.216.340
Jumlah		281.840.627	287.962.018	356.409.341	368.673.244	459.073.428

Sumber: Satu DJA Kementerian Keuangan (<https://satudja.kemenkeu.go.id/>)

Anggaran penyuluhan ini digunakan untuk berbagai kegiatan strategis, antara lain pendampingan teknis kepada pelaku utama dan kelompok usaha, fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok serta badan usaha kelautan dan perikanan, pengembangan percontohan penyuluhan, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pengembangan teknologi digital penyuluhan yang semakin penting dalam memperluas akses dan efektivitas layanan penyuluhan.

Selama periode 2020-2024, anggaran penyuluhan juga berperan penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan nasional, seperti peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan nilai ekspor hasil perikanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi distribusi dan aktivitas lapangan, alokasi anggaran penyuluhan tetap menjadi prioritas untuk menjaga kesinambungan program pemberdayaan dan inovasi di sektor ini.

Dengan dukungan anggaran yang memadai dan terencana, Pusluh KP mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai ujung tombak penyuluhan kelautan dan perikanan, memperkuat kapasitas pelaku usaha, dan mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi KKP dalam Rencana Strategis 2020-2024.

1.2.2 Permasalahan

Pada tahun 2024, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target pembangunan sektor kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;

2. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
3. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai;
4. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
5. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
6. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
7. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas; dan
8. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.3 Analisis Potensi dan Permasalahan

Analisis lingkungan strategis Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) pada tahun 2024 mencerminkan dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan fungsi penyuluhan dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Secara internal, Pusluh KP memiliki kekuatan berupa struktur organisasi yang terintegrasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sumber daya manusia penyuluh yang tersebar di berbagai wilayah, serta dukungan sarana, prasarana, dan teknologi digital yang semakin berkembang untuk memperkuat efektivitas penyuluhan.

Di sisi eksternal, Pusluh KP beroperasi dalam konteks kebijakan nasional yang menekankan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Lingkungan strategis ini juga dipengaruhi oleh tantangan seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, serta tuntutan transformasi digital dan inovasi dalam penyuluhan.

Selain itu, Pusluh KP menghadapi peluang besar dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi biru, pengembangan teknologi informasi, serta kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional.

Hal ini membuka ruang bagi Pusluh KP untuk memperluas jejaring, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan peran penyuluhan dalam pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

- Jumlah penyuluh sebanyak 4.100 orang;
- SDM calon penyuluh tersedia dari lulusan Satuan Pendidikan KP;
- Regulasi terkait penyelenggaraan penyuluhan sudah tersedia;
- Wilayah kerja penyuluh berada di kabupaten/kota;
- Sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan teknologi tepat guna di lokasi percontohan penyuluhan;
- Kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga lainnya, lembaga swadaya masyarakat/*Non-Government Organization* (NGO) dan pihak swasta sudah terbentuk.

Faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kelemahan antara lain:

- Sebaran penyuluh di setiap provinsi tidak merata;
- Kompetensi teknis penyuluh di bidang usaha tertentu masih kurang memadai;
- Beberapa regulasi terkait penyuluhan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- Belum ada kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota;
- Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan masih kurang memadai.

Faktor strategis lingkungan eksternal yang menjadi peluang antara lain:

- Jumlah pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 47.500 kelompok;
- Kelompok pelaku usaha/swasta yang dapat difungsikan menjadi lembaga penyuluhan;
- Program prioritas KKP yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Teknis KKP dan Program kementerian/lembaga lainnya memerlukan pendampingan penyuluh;
- Potensi menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga lainnya, NGO dan pihak swasta melalui mekanisme kerja baru;

- Bantuan untuk masyarakat kelautan dan perikanan yang bersumber dari pihak swasta/NGO;
- Potensi penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penyuluhan.

Faktor strategis lingkungan eksternal yang menjadi ancaman antara lain:

- Kurangnya koordinasi dengan penyuluh swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- Keterbatasan dalam memvalidasi teknologi tepat guna oleh pelaku usaha ditengah kemudahan akses informasi;
- Permintaan pasar terhadap ketertelusuran produk-produk kelautan dan perikanan.

Secara keseluruhan, analisis lingkungan strategis ini menjadi dasar bagi Pusluh KP dalam menyusun rencana strategis dan menetapkan program kerja yang adaptif, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Sebagai organisasi dibawah BPPSDM KP yang menangani kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan, Pusluh KP mengacu pada Visi BPPSDM KP dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden.

2.2 Misi

Misi Pusluh KP mengacu pada misi BPPSDM KP yaitu menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari sembilan misi Presiden, KKP mendukung empat misi, sebagai berikut:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;

3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2.3 Tujuan

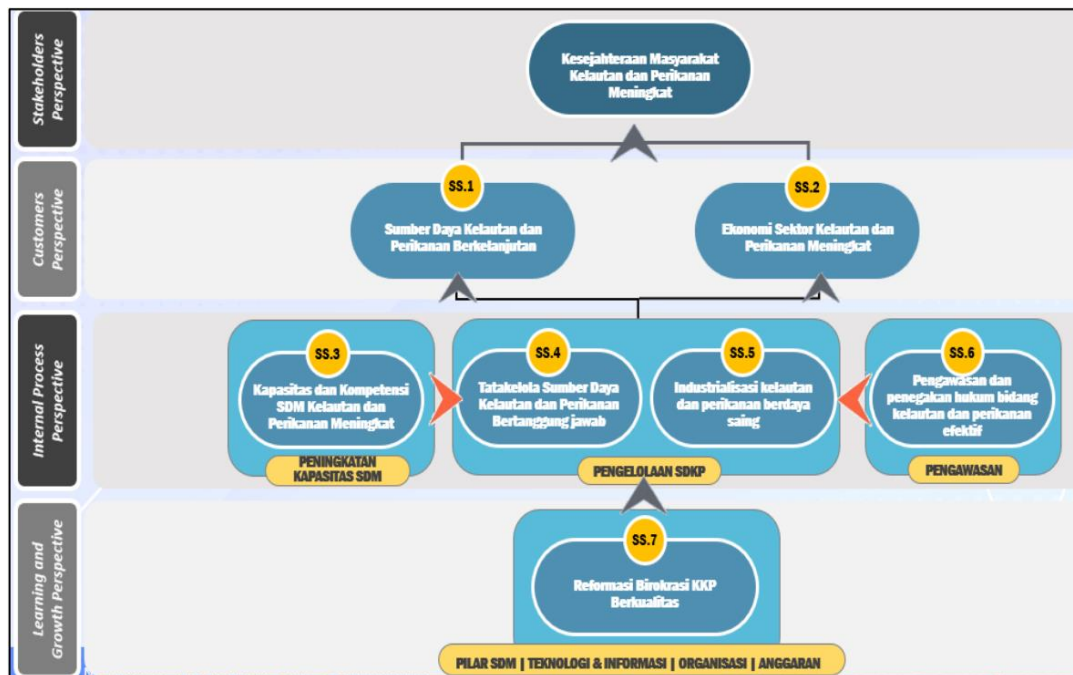
Tujuan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang ingin dicapai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing; dan
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan yang ingin dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada sektor sumber daya manusia tercermin dalam SS-3, yaitu “Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan”, serta SS-7, yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) KKP yang berkualitas”. Sasaran program pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh KKP sebagai outcome dari pelaksanaan berbagai program yang dilaksanakan.

Dalam penyusunan Peta Strategis, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan prinsip *Balanced Scorecard* (BSC) yang terdiri dari empat perspektif utama, yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*), perspektif pelanggan (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal process perspective*), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*), dengan Peta Strategis sebagai berikut:



Gambar 6. Peta strategis KKP 2020-2024

Seluruh sasaran program BPPSDM KP beserta indikatornya bertujuan untuk mendukung sasaran strategis KKP tahun 2020-2024 yaitu Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan KP yang meningkat. Adapun dukungan BPPSDM KP pada setiap Sasaran Strategis (SS) adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis ketiga SS-3 yang akan dicapai yaitu “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan sasaran program dan indikator kinerja program:

SP-1: SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

IKP: Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)

SP-2: SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)

IKP: Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)

SP-3: Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan

IKP-1: Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)

IKP-2: Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)

SP-4: Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat

IKP: Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kelautan dan Perikanan

SP-5: Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

IKP: Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)

SP-6: Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan

IKP: Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)

SP-7: Tata kelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM

- IKP-1: Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)
- IKP-2: Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan (LK) BPPSDM (%)
- IKP-3: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BPPSDM (indeks)
- IKP-4: Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPPSDM (nilai)
- IKP-5: Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)
- IKP-6: Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
- IKP-7: Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)
- IKP-8: Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)
- IKP-9: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM (nilai)
- IKP-10: Nilai Kinerja Anggaran BPPSDM (nilai)
- IKP-11: Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) BPPSDM (%)
- IKP-12: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)
- IKP-13: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, agenda pembangunan nasional, prioritas nasional, serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kebijakan ini dirumuskan untuk mengantisipasi dan merespons berbagai isu global dan nasional yang berdampak pada pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia.

RPJMN 2020-2024 menempatkan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang produktif, berkelanjutan, dan inklusif. Dalam konteks ini, KKP mengarahkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan, menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta memperkuat tata kelola sumber daya secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, arah kebijakan KKP juga mengintegrasikan komitmen terhadap SDGs, khususnya yang terkait dengan pengentasan kemiskinan (SDG 1), kelaparan nol (SDG 2), kehidupan bawah air (SDG 14), serta kerja layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8). Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target tersebut melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

Isu-isu global seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem laut, dan tekanan terhadap keanekaragaman hayati menjadi tantangan utama yang memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Di tingkat nasional, tantangan seperti ketimpangan akses sumber daya, rendahnya kapasitas teknologi, serta kebutuhan penguatan kelembagaan dan regulasi juga menjadi fokus kebijakan.

Strategi nasional KKP mencakup peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan korporasi nelayan dan pelaku usaha,

peningkatan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan, serta penguatan pengawasan dan konservasi sumber daya. Selain itu, pengembangan inovasi teknologi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian integral dari strategi untuk mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan menuju ekonomi biru yang berkelanjutan. Arah kebijakan dan strategi nasional KKP 2020-2024 merupakan kerangka kerja yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional dan global, yang bertujuan mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas nasional dengan visi mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan mengacu pada tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pengembangan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar; lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Dalam konteks ini, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

Arah kebijakan pembangunan menitikberatkan pada prinsip ekonomi biru yang menuntut pengelolaan sumber daya laut secara lestari dan ramah lingkungan. Kebijakan utama meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat, serta penguatan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, pengembangan klaster kawasan perikanan budidaya

terintegrasi menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas benih, pengelolaan limbah, biosekuriti, dan pemasaran hasil budidaya.

Isu-isu global dan nasional yang berdampak signifikan, seperti perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu air laut dan degradasi ekosistem pesisir, pandemi COVID-19, serta dinamika pasar global, menjadi perhatian utama dalam perumusan strategi. Dampak perubahan iklim diperkirakan akan menurunkan keuntungan ekonomi sektor perikanan hingga 15-26 persen pada tahun 2050 jika tidak diantisipasi dengan pengelolaan yang kuat. Oleh karena itu, strategi pembangunan juga menekankan adaptasi teknologi ramah lingkungan, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Seluruh kebijakan dan strategi ini diimplementasikan melalui program-program terpadu yang meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi dan riset, fasilitasi usaha dan pembiayaan, peningkatan standar mutu dan keamanan produk, serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerja sama lintas sektor. Pendekatan spasial berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) juga menjadi basis dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dan transformasi kelembagaan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut demi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan masa depan.

3.3 Arah Kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

Pengembangan SDM pada periode 2021-2024 diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

1. Penyuluhan KP

Kegiatan penyuluhan didasarkan pada metode dan materi penyuluhan yang partisipatif dan inovatif dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok);

- b. peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM serta Koperasi);
- c. peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar dan akses permodalan; dan
- d. peningkatan kolaborasi penyuluhan dengan pendidikan dan pelatihan dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Penataan penyelenggaraan penyuluhan, terutama pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana kewenangan penyelenggaraan penyuluhan menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan fokus kepada ketenagaan, kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan.

2. Pendidikan KP

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pendidikan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, dan kelembagaan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan.

Arah pendidikan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama kelautan dan perikanan sebanyak 100% di satuan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan *teaching factory* dibidang kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik kelautan dan perikanan;
- e. meningkatkan kerja sama pendidikan dengan lembaga lain;
- f. peningkatan kualitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat; dan

- g. pengembangan inovasi teknologi terapan melalui *Project Based Learning*.

Penataan kelembagaan pendidikan, merupakan langkah KKP memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah menjadi kewenangan daerah. Sehingga sejak tahun 2019, proses penataan lembaga Sekolah Usaha Perikanan Menengah sudah dimulai.

3. Pelatihan

Pelatihan kelautan dan perikanan diselenggarakan melalui pelatihan bagi masyarakat dan aparatur. Pelatihan bagi masyarakat ditujukan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Sedangkan diklat bagi aparatur ditujukan bagi aparatur negara yang memiliki peran, partisipasi dan kontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan, baik aparatur di lingkungan KKP, maupun aparatur di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Diklat aparatur terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan, yaitu diklat manajerial, teknis dan *blended* kultural.

Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha dan taraf kehidupannya. Pelatihan bagi aparatur KKP dan aparatur daerah yang membidangi kelautan dan perikanan, ditujukan untuk menyiapkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial, serta sebagai fasilitator bagi kepentingan para pelaku utama. Arah pelatihan KP yang dilaksanakan antara lain:

- a. mengembangkan Sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F) 1995;
- b. melakukan akreditasi program pelatihan kelautan dan perikanan;
- c. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan;
- d. mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan;

- e. mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan pendidikan bisnis berbasis *digital talent* untuk menghasilkan *start up* di bidang kelautan dan perikanan;
- f. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (*online* pendidikan); dan
- g. mengembangkan penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional binaan KKP.

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung RPJMN, Rencana Strategis KKP dan Rencana Strategis BPPSDM KP tahun 2020-2024, Pusluh KP merumuskan berbagai kebijakan dan strategi yang bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan efektivitas penyuluhan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya sektor kelautan dan perikanan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan dan strategi penyuluhan kelautan dan perikanan pada tahun 2024 adalah:

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi utama difokuskan pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme penyuluh melalui:

- Pelatihan berbasis teknologi untuk menguasai inovasi di bidang budidaya, konservasi, dan pengolahan hasil perikanan; dan
- Pemanfaatan *platform* digital (*e-learning*, aplikasi penyuluhan) untuk memperluas jangkauan pelatihan dan akses informasi.

2. Transformasi Sistem Penyuluhan Berbasis Teknologi

- Digitalisasi layanan penyuluhan melalui aplikasi untuk memudahkan monitoring, pelaporan, dan diseminasi informasi;
- Pengembangan percontohan penyuluhan berbasis teknologi ramah lingkungan, seperti budidaya udang berkelanjutan dan sistem akuakultur terintegrasi; dan
- Pemanfaatan data *real-time* untuk analisis kebutuhan pelaku usaha dan penyesuaian program penyuluhan.

3. Penguatan Jejaring dan Kemitraan

- Kolaborasi lintas sektor dengan perguruan tinggi, swasta, BUMN, dan organisasi masyarakat dalam pendampingan teknis, riset, dan pengembangan usaha;

- Sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan distribusi penyuluh dan meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil dan
 - Kemitraan internasional (misalnya dengan FAO dan Korea Selatan) untuk transfer teknologi, sertifikasi SDM, dan penguatan kapasitas penyuluh.
4. Pemberdayaan Pelaku Utama dan Kelembagaan
- Fasilitasi pembentukan kelompok usaha (KUB, Pokdakan) dan badan hukum usaha kelautan/perikanan;
 - Pendampingan teknis berkelanjutan dalam pengelolaan usaha, akses permodalan, dan pemasaran produk; dan
 - Penguatan kelembagaan penyuluhan melalui Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) sebagai ujung tombak layanan di daerah.
5. Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
- Penyuluhan berbasis ekonomi biru untuk mendorong praktik budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - Edukasi mitigasi perubahan iklim kepada pelaku usaha, termasuk adaptasi teknologi untuk mengurangi dampak kenaikan suhu laut dan kerusakan ekosistem; dan
 - Penekanan pada konservasi sumber daya melalui program penyadaran masyarakat tentang pentingnya kawasan lindung dan pengelolaan limbah.
6. Penanganan Tantangan Strategis
- Mengatasi ketimpangan distribusi penyuluh dengan realokasi sumber daya dan rekrutmen berbasis kebutuhan wilayah;
 - Peningkatan kualitas sarana/prasarana penyuluhan, termasuk kendaraan operasional, alat ukur kualitas air, dan fasilitas pelatihan; dan
 - Adaptasi pascapandemi COVID-19 melalui pelatihan daring dan pendampingan usaha untuk pemulihan ekonomi pelaku usaha.



Gambar 7. Proses bisnis penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan

3.5 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi penyuluhan kelautan dan perikanan, Pusluh KP mengusulkan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Kepala BPPSDM KP tentang Programa Penyuluhan Perikanan Nasional 2025; dan
4. Keputusan Kepala BPPSDM KP tentang Inovasi Tepat Guna sebagai Materi Penyuluhan.

Urgensi penyusunan dan penetapan masing-masing Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai usulan kerangka regulasi Pusluh KP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan

Urgensi penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

sangat penting sebagai kerangka regulasi yang mendukung penguatan sistem penyuluhan di sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2024. Saat ini, penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan menghadapi tantangan berupa kebutuhan standarisasi kelembagaan, peningkatan mutu layanan, serta penyesuaian dengan dinamika pembangunan nasional dan global yang semakin kompleks.

Penetapan regulasi ini diperlukan untuk memberikan kejelasan status, peran, dan klasifikasi UPT Penyuluhan yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga mampu menjalankan fungsi secara efektif, terukur, dan akuntabel. Klasifikasi UPT Penyuluhan akan menjadi dasar dalam penetapan standar pelayanan minimal, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, serta penguatan tata kelola kelembagaan sesuai dengan karakteristik, kapasitas, dan kebutuhan daerah. Dengan adanya klasifikasi yang jelas, proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja UPT Penyuluhan dapat dilakukan secara lebih objektif dan terarah.

Selain itu, regulasi ini akan memperkuat integrasi dan sinergi antara pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan penyuluhan, serta mendukung pelaksanaan kebijakan nasional seperti penguatan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Penetapan klasifikasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung transformasi penyuluhan berbasis teknologi, pengembangan inovasi, dan peningkatan kapasitas SDM penyuluh agar adaptif terhadap tantangan perubahan iklim, digitalisasi, dan dinamika pasar global.

Peraturan Menteri ini sangat urgen untuk segera ditetapkan sebagai landasan hukum yang memperkuat posisi, fungsi, dan kinerja UPT Penyuluhan, sekaligus memastikan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan berjalan secara profesional, efektif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

Penetapan Peraturan Menteri ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dinamis, sekaligus memperkuat fondasi kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung. Berdasarkan data KKP (2024), hanya 55% pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terdaftar dalam sistem Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), sementara sisanya belum terdata secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka regulasi yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas, legalitas, dan sinergi antarpelaku.

Permen KP ini juga menjadi respons atas ketimpangan regulasi sebelumnya, seperti Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2012 yang dinilai belum mengakomodasi perkembangan terkini, seperti:

- a. Kesenjangan definisi "pelaku utama" dan "pelaku usaha" dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- b. Belum terintegrasinya indikator penilaian kelas kemampuan kelompok (Pokdakan, KUB, Poklahsar, dll.) ke dalam sistem penyuluhan; dan
- c. Tuntutan transformasi digital dalam pendampingan, pelaporan, dan monitoring kelembagaan.

Dampak dan Manfaat:

a. Standardisasi Kelembagaan

Permen ini menetapkan klasifikasi kelembagaan pelaku usaha (nelayan, pembudidaya, pengolah) dan pelaku pendukung (penyedia jasa, tenaga ahli, lembaga riset) secara jelas, termasuk tahapan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan. Misalnya, penjenjangan kelompok usaha menjadi empat kelas kemampuan (pemula, lanjutan, madya dan utama) dengan indikator terukur, memudahkan penyuluh dalam melakukan pendampingan berbasis kebutuhan.

- b. **Penguatan Peran Penyuluh**
 Penyuluh difasilitasi untuk melakukan asistensi administrasi, teknis, dan manajerial selama 6 bulan secara intensif (sebelumnya 1 tahun), sehingga proses peningkatan kapasitas pelaku usaha lebih efisien. Permen ini juga mengakomodasi penambahan jenis kelompok seperti KOMPAK (Kelompok Konservasi) dan Pokwis (Kelompok Wisata Bahari), yang sebelumnya belum diatur.
- c. **Sinergi dengan Agenda Nasional dan Global**
 Regulasi ini selaras dengan RPJMN 2020-2024 yang menekankan pemberdayaan UMKM dan pembangunan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian SDGs Tujuan 8 (Pekerjaan Layak) dan Tujuan 14 (Ekosistem Laut). Selain itu, Permen KP ini akan memperkuat implementasi ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
- d. **Dukungan Regulasi Terkait**
 Permen ini menjadi turunan dari Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kebijakan Kelautan dan Perikanan, serta memperkuat dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Garam.

Tantangan yang Diantisipasi:

- Ketimpangan distribusi penyuluh di daerah terpencil, yang diatasi dengan mekanisme alokasi sumber daya berbasis kebutuhan wilayah;
 - Adaptasi teknologi dalam pendampingan, mengacu pada platform digital; dan
 - Koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaku pendukung (swasta, akademisi, BUMN) terlibat aktif dalam pengembangan kelembagaan.
3. **Keputusan Kepala BPPSDM KP tentang Programa Penyuluhan Perikanan Nasional 2025**

Urgensi penetapan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) tentang Program Penyuluhan Perikanan Nasional 2025 sangatlah strategis sebagai kerangka regulasi yang mengarahkan pelaksanaan penyuluhan

kelautan dan perikanan secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Keputusan ini menjadi landasan hukum dan pedoman operasional bagi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) dalam menjalankan fungsi penyuluhan yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, serta pengembangan inovasi teknologi di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan kelautan dan perikanan yang kompleks, termasuk perubahan iklim, permasalahan pasca pandemi COVID-19, dan dinamika pasar global, program penyuluhan nasional yang terstruktur sangat dibutuhkan untuk memastikan transfer teknologi dan informasi yang tepat sasaran, serta peningkatan kompetensi pelaku usaha secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan ini juga menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan peran penyuluh kelautan dan perikanan melalui penyusunan rencana kegiatan yang berbasis data kebutuhan lapangan, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan jejaring kemitraan lintas sektor.

Selain itu, Keputusan Kepala BPPSDM KP ini mendukung pencapaian target kinerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, seperti peningkatan jumlah masyarakat yang dilatih, persentase lulusan yang terserap di dunia usaha, serta pengembangan desa perikanan cerdas (*Smart Fisheries Village*). Dengan adanya regulasi ini, penyelenggaraan penyuluhan dapat lebih terkoordinasi dan terukur, sehingga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional.

Penetapan Keputusan ini menjadi langkah krusial untuk memperkuat tata kelola penyuluhan kelautan dan perikanan, mendukung transformasi digital penyuluhan, serta mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025.

4. Keputusan Kepala BPPSDM KP tentang Inovasi Tepat Guna sebagai Materi Penyuluhan

Penetapan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) tentang Inovasi

Tepat Guna sebagai Materi Penyuluhan memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam mendukung efektivitas dan relevansi penyuluhan kelautan dan perikanan di Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan resmi untuk memasukkan inovasi-inovasi praktis dan aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan ke dalam materi penyuluhan, sehingga penyuluhan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga mampu memberikan solusi nyata di lapangan.

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan yang semakin kompleks dan dinamis, termasuk tantangan perubahan iklim, pandemi, serta persaingan pasar global, inovasi tepat guna menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan keberlanjutan sumber daya. Keputusan ini akan memandu penyuluh dalam menyampaikan teknologi dan metode terbaru yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan mudah diterapkan oleh masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

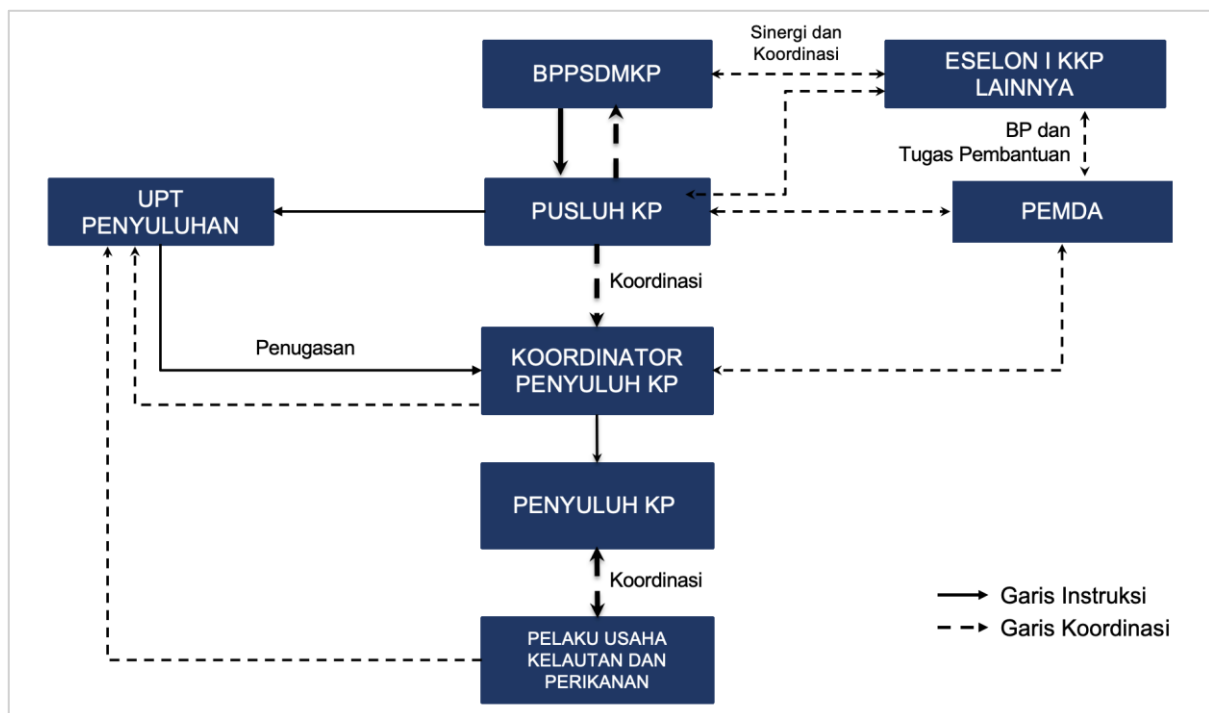
Selain itu, penetapan regulasi ini mendukung pencapaian sasaran strategis Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, khususnya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat inovasi dan riset, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan. Regulasi ini juga sejalan dengan misi BPPSDM KP untuk menghasilkan SDM kelautan dan perikanan yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan adanya Keputusan Kepala BPPSDM KP tentang Inovasi Tepat Guna sebagai Materi Penyuluhan, diharapkan penyuluhan kelautan dan perikanan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional, serta mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Regulasi ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penyuluhan dan mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan.

3.6 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan fondasi utama dalam mendukung arah kebijakan dan strategi penyuluhan kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai unit eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Pusluh KP memiliki tugas pokok menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Struktur kelembagaan Pusluh KP mencakup berbagai fungsi strategis, mulai dari penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga penilaian teknologi yang direkomendasikan untuk penyuluhan. Dalam pelaksanaannya, Pusluh KP didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mengelola administrasi penyuluh perikanan di tingkat daerah, seperti Balai Riset dan Penyuluhan Perikanan yang berperan sebagai Satminkal serta Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP). Model kelembagaan ini memungkinkan pengelolaan penyuluhan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah dengan mekanisme koordinasi yang efektif.



Gambar 8. Alur koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan

Penguatan kelembagaan Pusluh KP dilakukan melalui beberapa upaya strategis, antara lain:

- **Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh**
Melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan jenjang karier, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas penyuluhan.
- **Optimalisasi Tata Kelola dan Akuntabilitas**
Dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan mekanisme pelaporan yang transparan, Pusluh KP memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab.
- **Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Prasarana**
Penyediaan kendaraan operasional, alat ukur kualitas air, fasilitas pelatihan, dan teknologi informasi mendukung pelaksanaan penyuluhan secara optimal.
- **Penguatan Koordinasi dan Sinergi**
Membangun kemitraan lintas sektor dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat jejaring penyuluhan dan pemberdayaan pelaku usaha.
- **Desentralisasi dan Delegasi Kewenangan**
Melalui Satminkal di tingkat daerah, pengelolaan administrasi dan pembinaan penyuluh dapat dilakukan lebih dekat dengan pelaku utama, sehingga responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dengan kerangka kelembagaan yang kokoh dan upaya penguatan tersebut, Pusluh KP mampu menjalankan fungsi penyuluhan secara profesional, adaptif, dan inovatif. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi penyuluhan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas SDM, transformasi digital, pemberdayaan pelaku usaha, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kerangka kelembagaan yang kuat menjadi kunci keberhasilan Pusluh KP dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif, produktif, dan berdaya saing di Indonesia.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat. Sasaran strategis program pengembangan SDM KP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program.

Indikator Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) tahun 2024 dirancang mengacu pada Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Indikator Sasaran Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Indikator Kinerja ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Secara garis besar, pada tahun 2024 Pusluh KP menetapkan empat sasaran yang diukur melalui 21 indikator kinerja, yang ditampilkan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 7. Indikator kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Rupiah Milyar	2,293
	2	Penyuluh Perikanan PNS yang Bersertifikat Kompetensi	%	50
	3	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh	Kelompok	47.500
	4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya	Kelompok	2.000
	5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk	Kelompok	4.000

	6	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Orang	12.283
	7	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha	Kelompok	100
	8	Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan Prioritas KKP	Orang	2.100
Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek	Desa	14
	10	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok	35
Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan	11	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Disusun	NSPK	4
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	12	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	13
	13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	%	100
	14	Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	%	94
	15	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Indeks	81
	16	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	%	≤ 0,5
	17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	%	82
	18	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Nilai	81
	19	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Nilai	94
	20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Nilai	93,76
	21	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Nilai	82

Indikator kerja tersebut selaras dengan sasaran strategis KKP yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, peningkatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, pemanfaatan hasil riset dan inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pusluh KP berperan dalam mendukung sasaran tersebut melalui program penyuluhan yang adaptif dan berbasis teknologi, fasilitasi pembentukan kelompok usaha, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha.

Pengukuran kinerja Pusluh KP dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dengan menggunakan sistem aplikasi kinerja yang terintegrasi di lingkungan KKP, sehingga memudahkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian secara *real-time*. Selain itu, indikator kinerja ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran, memastikan bahwa setiap kegiatan penyuluhan terarah dan memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan.

Dengan kerangka indikator kinerja utama yang terintegrasi dan terukur, Pusluh KP mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan penyuluhan, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi KKP dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan pada tahun 2024.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) tahun 2024 dirancang secara strategis untuk mendukung arah kebijakan, strategi, serta kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dalam mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pendanaan ini mengacu pada hasil reviu Rencana Strategis Pusluh KP 2024 yang menyesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2023, pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satuan kerja, serta kebijakan penganggaran dan kelembagaan terbaru di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP).

Alokasi anggaran Pusluh KP tahun 2024 difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan program penyuluhan yang inovatif dan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, fasilitasi pembentukan dan pengembangan

kelembagaan pelaku usaha, serta pendampingan teknis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kerangka pendanaan ini juga mengintegrasikan prinsip perencanaan dan penganggaran tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024 dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendekatan ini memastikan bahwa alokasi dana tidak hanya terpaku pada satu aspek, melainkan mencakup seluruh rantai nilai penyuluhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi yang terhubung secara sinergis antar wilayah dan pemangku kepentingan.

Selain itu, kerangka pendanaan Pusluh KP tahun 2024 menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional dan tantangan global, termasuk perubahan iklim, serta kebutuhan transformasi digital penyuluhan. Dengan dukungan pendanaan yang memadai dan terencana, Pusluh KP dapat memperkuat peran penyuluh sebagai agen perubahan, memperluas akses teknologi dan informasi, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kerangka pendanaan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategi penyuluhan kelautan dan perikanan yang adaptif, inovatif, dan berdampak luas, sehingga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) tahun 2024 ini merupakan landasan penting dalam mengarahkan segala aktivitas penyuluhan kelautan dan perikanan secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Reviu dan penyempurnaan Renstra ini disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta arahan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), sehingga mampu menjawab tantangan dan peluang pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Dengan mengacu pada target-target kinerja yang realistis dan terukur, serta didukung oleh kerangka kelembagaan dan pendanaan yang memadai, Pusluh KP berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kemitraan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyuluhan. Hal ini sejalan dengan visi KKP untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha kelautan.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan aplikatif bagi seluruh unit kerja di lingkup Pusluh KP dalam melaksanakan program dan kegiatan penyuluhan selama sisa periode Renstra 2020-2024. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen dan pelaksanaan program di masa mendatang. Semoga upaya ini mendapat ridho dan dukungan dari semua pihak demi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.

Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Hendra Yusran Siry

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Rupiah Milyar	-	-	3,990	9,768	2,293
2	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi	Orang	180	180	608	1.890	-
3	Persentase Penyuluh Perikanan PNS yang Lulus Uji Kompetensi	%	-	-	-	-	75
4	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Disusun	NSPK	-	4	6	9	4
5	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan	Lembaga	6	7	7	7	-
6	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh	Kelompok	41.000	41.000	45.000	47.000	47.500
7	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya	Kelompok	1.735	1.500	1.800	1.980	2.000
8	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk	Kelompok	2.100	2.000	3.000	3.400	4.000
9	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Orang	-	-	14.082	12.342	12.349

10	Fasilitasi Kelompok Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha	Pelaku Usaha	-	-	-	-	100
11	Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan Prioritas KKP	Orang	-	-	-	-	2.100
12	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Penyuluhan KP	Desa	5	5	5	9	10
13	Kawasan yang Mengoptimalkan Aset untuk Percontohan Penyuluhan	Kawasan	-	-	-	-	10
14	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok	12	9	20	21	35
15	Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Unit	5	15	12	15	1
16	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan	Kesepakatan / Dokumen	5	8	8	10	13

	Kelautan dan Perikanan						
17	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	%	-	100	100	100	100
18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Nilai	-	87	92	93	94
19	Persentase Unit Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	%	82	84	86	93	94
20	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Indeks	72	73	76	77	81
21	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Nilai	1	≤1	≤1	≤0,5	≤0,5
22	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	%	60	65	70	80	82
23	Penilaian Mandiri SAKIP	Nilai	-	-	-	80	81

	Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
24	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Nilai	Baik (88)	-	-	-	93,76
25	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Nilai	85	-	-	-	71